

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166)
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gajah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165)
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164)
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163)
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139  
Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

**BUKU**

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011)
- Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006*, (Yogyakarta:PTN-BHI Press, 2009)
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*. (Yogyakarta: PTN-BHI Press, 2004)
- Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004)
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- François Ost, translated by Iain Stewart. *Legal System between Order and Disorder*. (Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002)
- Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan FUndamen Bagi Solusi di Indonesia*, (Yogyakarta: PTN-BHI Press, 2013)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Hamid Attamimi, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992)
- I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005)
- Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas, 2018)
- Kalihputro Fachriansyah dan Endang Sulastri, *Evaluasi Pengembangan PTN-BH Sebagai Pusat Unggulan (Centre of Excellence)*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan BAPPENAS, 2019)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009)

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, (Jakarta: KPK, 2009)
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan (Dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H.)*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020)
- Muh. Affan R Tojeng, *Pencegahan Dan Pengendalian Konflik Kepentingan Di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Transparency International Indonesia & Yayasan Tifa, 2017)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Nukthoh Afawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Edisi Pertama, (Bandung: Alumni, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan ke-1, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Pratikno et al, *Intelektual Jalan Ketiga: Pemikiran Cornelis Lay Tentang Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme, & Reformasi Keamanan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019)
- Rudy Badil, dkk, *Soe Hok Gie. Sekali lagi Buku, Pesta dan Cinta di Alam Bangsanya* (Jakarta: KPG, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusamedia, 2019)
- Theo Mayer-Maly, *Partes Iuris, Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, diedit oleh John W. Cairns dan Olivia F. Robinson, (Oregon: Hart Publishing, 2004)
- Thomas T. Pureklolon. *Politik Nasionalisme*, (Malang: Intrans Publishing, 2018)

## JURNAL ILMIAH

- Abdus Salam. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, no. 2 (2015). DOI: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.341>
- Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al-Husaban. "Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study", *European Journal of Social Science*, Vol. 21, no. 4 (2011): 533–546. DOI: <https://doi.org/10.29198/ejss>

- Alip Sugianto, "Manajemen Konflik Organisasi Dalam Menciptakan Komunikasi Efektif Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 24 No. 2, Desember 2020
- Agus Sutono. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional", *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 5, No. 1 Januari 2015
- Andi Yuniliani. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4 Desember 2017
- Arfan Faiz, Muhlizi. "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi", *Jurnal Rechts Vinfing*, Vol. 1, No. 1 Januari-April 2012
- Ateng Syarifudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan.  
DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v1i1.141>
- Bayu Dwi Anggono. "Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya", *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018). DOI: [10.14710/mmh.47.1.2018.1-9](https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9)
- Dian Agung Wicaksana. "Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Diana Sekar Anggraini, "Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, September 2019
- Dwi Afrimeti Timoera. "Asas Legalitas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 10, No. 2 April 2011. DOI: <https://doi.org/10.21009/jimd.v10i2.2298>
- Erli Salia. "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*", *Jurnal UM Palembang* (2017). DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1546>
- Ferry Irawan Febriansyah. "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang". *Jurnal Perspektif* 17, no. 3 (2012). DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.107>
- Firma Aditya Zaka dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1 Juni 2018. DOI: [10.22212/jnh.v9i1.976](https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976)
- Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, (2015). DOI: [10.20473/jd.v1i1.9737](https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9737)
- Hamid Atamimi, "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, Februari 1985
- Lia Sutini, "Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, September 2019
- Logemann, dalam Julista. Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 2, April-Juni 2011
- Moh. Baris Siregar. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

- Indonesia Law Reform Journal 1, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3 September 2020
- OECD (Economic Co-operation and Development), *Managing Conflict of Interest in the Public Sector : A Toolkit*, (Paris : OECD Publishing, 2005)
- Pujiono dan Made Dudy Satyaawan, “Strategi Penerapan Tata Kelola Universitas Yang Baik (Good University Governance), Jurnal Akuntansi Akrua, Vol. 3, No. 1 , 2011
- R. Anggoro Rahardjo Harry Anwar, “Peran Rektor Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Lalangbuana Bandung)”, *Sosiohumanitas Journal*, Vol. 18, No. 2 (2016). DOI: <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v18i2.72>
- Rusmini, “Konsep Otonomi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Sinergis*, Vol. 2, No. 2 2014
- Sunyoto Usman. “Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 2 November 1999
- Shobirin, “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 1 2021
- Shandi Patria Airlangga. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis”, *Jurnal FH Unila*, Vol. 3, No. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Teguh Prasetyo. “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* (2010). DOI: <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/3221>
- Wahyudi Diafar. “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Vol. 4, No.3 November 2015. DOI: [10.25216/JHP.4.3.2015.361-384](https://doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.361-384)
- Yusar Sagara, *Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 12 No. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.13226>

## SKRIPSI

- Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita

- I – Pelita IV”, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta (1990).
- Asasiputih, “Kedudukan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Sebagai Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).
- Elviandri, “Judicial Review Dalam Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2007).
- Velliana Tanaya, “Perbuatan Melawan Hukum: Informasi Menyesatkan (Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public”, Skripsi, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (2018).
- Tri Cahya Indra Permana, “Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009

## ARTIKEL

- Ahmad Alamsyah Saragih, “2019: 297 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan,” Ombudsman Republik Indonesia, 2020, <<https://ombudsman.go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan>>
- Balairung Press, “Mahasiswa di Balik Terali Besi”, Mei 2018, <<https://www.balairungpress.com/2018/05/mahasiswa-di-balik-terali-besi/>>
- Muhammad Khadafi, “Jokowi Ubah Aturan Rangkap Jabatan Rektor PTN-BH, Nasib Ari Kuncoro”, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210719/9/1419589/jokowi-ubah-aturan-rangkap-jabatan-rektor-PTN-BH-nasib-ari-kuncoro>>, diakses pada 25 Juli 2021
- Mathieu Carpentier. *Kelsen on Derogation and Normative Conflicts. An Essay in critical reconstruction. Die Reine Rechtslehre auf dem Prüfstand ory of Law: Conceptions and Misconceptions*, Steiner Verlag, (Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020)
- Dhanty Arwa Ghiani, “Mengenal Lebih Dekat Sosok Hans Kelsen”, LK2 FH PTN-BH, <https://lk2fhPTN-BH.law.PTN-BH.ac.id/mengenal-lebih-dekat-sosok-hans-kelsen/>
- Kurniati, Dian dan Dwi Reinjani. “Rangkap Jabatan, Airlangga Hartarto Klaim Tetap Profesional”, <[https://kbr.id/nasional/10-2019/rangkap\\_jabatan\\_airlangga\\_hartarto\\_klaim\\_tetap\\_profesional/101043.html](https://kbr.id/nasional/10-2019/rangkap_jabatan_airlangga_hartarto_klaim_tetap_profesional/101043.html)>, diakses pada 25 Juli 2021

Prasetia, Andhika. “Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?”, <<https://news.detik.com/berita/d-4755724/menteri-rangkap-jabatan-pimpinan-parpol-bolehkah/2>>, diakses 25 Juli 2021

Soe Hok Gie, “Pelacuran Intelektual” yang termuat dalam Sinar Harapan 21 April 1969.

Widyastuti, Ariayi Yakti. “Ari Kuncoro Resmi Mundur Dari Komisaris BRI, Begini Penjelasan Lengkap Manajemen”, <<https://bisnis.tempo.co/read/1485974/ari-kuncoro-resmi-mundur-dari-komisaris-bri-begini-penjelasan-lengkap-manajemen>>, diakses 25 Juli 2021

Kompas, "Penasaran Berapa Gaji Dosen PNS di Perguruan Tinggi?", <<https://money.kompas.com/read/2021/09/14/223200326/penasaran-berapa-gaji-dosen-pns-di-perguruan-tinggi-?page=all>>

## DATA STATISTIK

Badan Pusat Statistik, “Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas: Februari 2021”, <<https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1904/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2021.html>>, diakses pada 29 September 2021

Badan Pusat Statistik, “Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi: Februari 2021”, <<https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/05/1909/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008-2021.html>>

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, “PDDikti Dalam Angka”, <<https://pddikti.kemdikbud.go.id>>, diakses pada 29 September 2021

## VIDEO

Diskusi Statuta, “Aliansi Dosen dan Mahasiswa PTN-BH-Diskusi ‘Menilik Statuta UI Yang Baru’”, 7.40, video, 24 Juli 2021, <<https://youtu.be/81ImUk7QtB8>>

Diskusi Salemba, “menimbang Revisi Statuta UI, Mengapa Harus Ada?”, 24 Juli 2021, <<https://www.youtube.com/watch?v=xXLW3c8WAtk>>

Refly Harun, “Live! Demi Rektor UI Statuta Direvisi! Rangkap Jabatan Rektor-Komisaris BUMN Boleh!!”, 20 Juli 2021, <<https://www.youtube.com/watch?v=r6D4kMnQtrU>>

Refly Harun, “Live! Memalukan!! Koordinator Tim Revisi Statuta UI Rektor UI Sendiri!! Konflik Kepentingan!!”, 23 Juli 2021, <<https://www.youtube.com/watch?v=OaGwkUhwOBI&t=733s>>